

IKHWANUL MUSLIMIN DAN POLITIK KENEGARAAN MESIR

Rusydi Sulaiman

STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka-Belitung
Jl. Raya Petaling Km.13 Kec. Mendobarat, Kab. Bangka 33171 Babel
Email: abirusydi@yahoo.co.id

Abstract: *Ikhwân al-Muslimîn and the Politic of Egypt State.* *Ikhwanul Muslimin* is a religious movement in Egypt which was regarded as an inspired and certain nuance, even it became a mainstream and as a trigger for advent of other movements. The present paper is a historical study which takes an effort to reconstruct a past even as religious phenomenon related to problem of politics. The study consists of political background in Egypt, Hasan al-Banna and Ikhwanul Muslimin, the organization of Ikhwanul Muslimin, and Ikhwanul Muslimin and political concept of Egypt State. Two data sources- used in this article whether it is primary or secondary- then are analyzed by using descriptive analysis. Based on the method used, the conclusion of the study is as follows: the factors that made the founding of Ikhwanul Muslimin namely the situations that influenced it, including politics. The figurative of al-Banna gives a big influence to Ikhwanul Muslimin's prospect; as a big religious movement in Egypt, Ikhwanul Muslimin also concerned with political ideas and strategies although the political aspect is not the main purpose.

Keyword: Ikhwanul Muslimin, religious movement, politics of Egypt State

Abstrak: *Ikhwanul Muslimin dan Politik Kenegaraan Mesir.* Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan keagamaan di Mesir yang unik dan memberikan nuansa tersendiri, bahkan dalam perkembangannya menjadi mainstream gerakan dan sebagai pemicu bagi munculnya gerakan-gerakan lain. Tulisan ini bersifat sejarah, berusaha merekonstruksi peristiwa masa lalu keagamaan di Mesir yang berkenaan dengan problem politik. Pembahasan meliputi beberapa sub, yaitu: latar belakang politik di Mesir, Hasan al-Banna dan Pembentukan Ikhwanul Muslimin, perkembangan gerakan, dan Ikhwanul Muslimin dan politik kenegaraan Mesir. Dua bentuk sumber data, baik primer maupun sekunder yang kemudian digunakan untuk analisis deskriptif. Akhirnya disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pembentukan dan peran Ikhwanul Muslimin termasuk situasi politik. Selain itu adalah ketokohan al-Banna dalam gerakan Ikhwanul Muslimin, dan gerakan tersebut memiliki ide politik dan strategi jitu walaupun sebenarnya aspek politik bukan tujuan utama dalam berdakwah.

Kata kunci: Ikhwanul Muslimin, gerakan keagamaan, politik kenegaraan Mesir

Pendahuluan

Sepanjang perkembangan sejarahnya, Mesir selalu diduduki bangsa lain, seperti Arab (641-935 M), Dinasti Fathimiyah (969-1171 M), Dinasti Ayyubiyah (1171-1250), Dinasti Mamluk (1250-1517 M), dan Turki Utsmani (1517-1805 M).¹ Bahkan selanjutnya berdatangan bangsa lain (non-Arab) ke daerah ini dengan alasan dan tujuan tertentu.

Walaupun statusnya sebagai wilayah kekuasaan Turki Utsmani, Mesir secara *de facto* dipegang oleh fraksi militer lokal yaitu dinasti

Mamluk. Sejak itu juga kedudukan ulama dan organisasi tarekat sufi cukup mengakar dan kokoh di Mesir. Tepatnya pada abad ke delapan belas masehi, Turki Utsmani yang sudah cukup lama berkuasa berubah lemah kontrol politiknya terhadap Mesir di samping posisinya yang sulit dijangkau oleh pemerintah pusat, sehingga muncul konflik berkepanjangan dikalangan fraksi mamluk yang berakibatkan pada kemunduran sistem irigasi, tingginya pajak, meningkatnya kepastoran dan otonomi kesukuan.² Kondisi Utsmani yang sangat lemah ini membawa kepada perubahan besar

¹ Mervin Hisket, *The Course of Islam in Africa* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1994), h. 53.

² Ira M. Lapidus, *a History of Islamic Society* (New York: Cambridge University Press, 1998), h. 616

seluruh sistem masyarakat Mesir. Salah satunya adalah karena pendudukan Prancis—Ekspedisi Napoleon—pada tahun 1798, pendudukan Inggris pada tahun 1870 dan ditunjuknya Muhammad Ali Pasha sebagai gubernur Turki Utsmani di Mesir pada tahun 1805.

Setelah itu bermunculan beberapa tokoh yang cukup diperhitungkan dan memegang peranan penting dalam proses pembaharuan di Mesir, antara lain: al-Tahtawi,³ al-Afghani,⁴ Abduh⁵

³ Nama lengkapnya adalah Rifa'ah Badawi Rafi' al-Tahtawi. Lahir di Tahta yang terletak di sebelah selatan Mesir dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Ia adalah murid kesayangan gurunya Syaikh Hasan al-Attar yang mempunyai banyak relasi dengan para ahli ilmu pengetahuan yang mendampingi Napoleon ketika melakukan ekspedisi ke Mesir. Al-Tahtawi diangkat menjadi guru di al-Azhar pasca studinya di lembaga tersebut. Pengalaman lain adalah menjadi imam tentara tahun 1824, imam mahasiswa dan dikirim ke Paris dan menetap di sana selama 5 tahun. Sekembalinya dari negara tersebut, ia menjadi guru Bahasa Perancis dan kemudian kepala lembaga terjemah dan surat kabar "al-Waqâ'i al-Mishriyah" di Mesir yang didirikan oleh Muhammad Ali Pasha. Beberapa karya tulisnya selain terjemahan antara lain: *Talkhîs al-Abrîzi fi Talkhîs Bariz, Manâhij al-Albâb al-Miṣriyah fi Manâhij al-Adâb al-'Ashriyah, al-Mursyid al-Amîn li al-Banât wa al-Banîn, al-Qaul al-Sadîd fi al-Ijtihâd wa al-Taqlîd, Anwârû Taufîqî al-Jalîl fi Akhbârî Mishra wa Tautsîqî Banî Ismâ'îl*. Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 42-45.

⁴ Nama lengkapnya Jamaluddin al-Afghani. Lahir di Afganistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul tahun 1897. Ia adalah tokoh pembaharu yang tempat tinggalnya dan aktivitasnya berpindah-pindah dari satu negara Islam ke negara Islam lainnya. Beberapa jabatan yang dipegang yaitu: pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afganistan, penasehat Sher Ali Khan tahun 1864, dan menjadi Perdana Menteri diangkat oleh Muhammad A'zam Khan. Menghindari campur tangan Inggris, ia kemudian menetap di Istanbul Turki atas undangan Sultan Abdul Hamid. Afghani adalah tokoh pembaharu politik yang meyakini bahwa Islam sesuai untuk semua bangsa, semua zaman dan keadaan. Bila terjadi perubahan, maka perlu melakukan interpretasi terhadap sumber ajaran Islam yaitu Alquran dan sunah. Jadi pintu ijtihad tetap terbuka. Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam...*, h. 51-54.

⁵ Muhammad Abduh lahir di sebuah desa di Mesir Hilir, ketika negara Mesir dalam keadaan sulit dan masyarakat berpindah-pindah karena tekanan represip penguasa. Begitu juga ayahnya Abduh Hasan Khairullah terakhir menetap di desa Mahallah Nasr. Setelah menekuni Bahasa Arab dan mendalami agama kepada pamannya syaikh Darwisi Khadr di Tanta, kemudian melanjutkan ke al-Azhar pada tahun 1866. Abduh banyak berguru kepada al-Afghani sejak tahun 1871 dan setelah beberapa tahun bersmaan dengan tamat studi tahun 1877, ia mengajar di lembaga tersebut, Darul Ulum dan di kediamannya. Beberapa pengalamannya: merintis Majalah al-Urwah al-Wusqâ dengan Afghani tahun 1884, menjadi anggota Majelis A'la al-Azhar, mufti di Mesir pada tahun 1899 sampai meninggal tahun 1905. Abduh adalah tokoh pembaharu Islam

dan Ridha,⁶ termasuk Hasan al-Banna dengan pola pemikiran yang sangat kontroversial mendapat simpati masyarakat yang menginginkan format baru. Apalagi kelompok-kelompok berkuasa sedang mengalami masa transisi baik dalam bidang pemikiran, politik, dan sosial.⁷

Hasan al-Banna tidak sendirian, juga mengagas pembentukan Gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang kemudian menyebar pengaruhnya di belahan dunia Islam. Khususnya politik, tidak sedikit peran gerakan tersebut di basisnya yaitu Mesir. Ia kemudian memberi peran cukup signifikan terhadap konstalasi politik kenegaraan Mesir. Hal tersebut yang menjadi fokus pembahasan tulisan ini, meliputi beberapa sub bahasan: situasi politik Mesir, Hasan al-Banna dan pembentukan gerakan, perkembangan gerakan Ikhwanul Muslimin, dan Ikhwanul Muslimin dan politik kenegaraan Mesir.

Situasi Politik Mesir

Ada tiga tipe nasionalisme yang muncul dalam rentang waktu antara tahun 1860-1914 M. Pertama, *Religious Nasionalism*, nasionalisme yang berdasarkan pada persamaan agama. Kedua, *Ethnic/Linguistic Nasionalism*, nasionalisme yang berdasarkan pada bangsa dan bahasa. Ketiga, *Territorial Patriotism*, nasionalisme yang berdasarkan pada kesamaan tempat atau wilayah.⁸

Dari ketiga tipe tersebut, tipe terakhirlah yang paling banyak berperan (1870-1880), di saat

Ridha, Qasim Amin, Farid Wajdi, Mustafa abd al-Raziq dan lain-lain. Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam...*, h. 58-68

⁶ Rasyid Ridha adalah murid terdekat Muhammad Abduh, lahir pada tahun 1865 di desa al-Qalamun Libanon, berasal dari keturunan al-Husein, cucu Nabi Muhammad saw. Ia berguru kepada Syaikh Husein al-Jisr di Madrasah al-Wathaniyah al-Islâmiyah, seorang ulama yang telah dipengaruhi ide-ide modern. Selanjutnya banyak dipengaruhi oleh ide al-Afghani dan Abduh melalui majalah al-Urwah al-Wutsqâ. Ridha menerbitkan majalah al-Manâr yang fokus dalam kajian pembaharuan bidang agama, sosial dan ekonomi, memberantas tahayul dan bid'ah dan menghilangkan faham fatalisme dari komunitas muslim. Ia kemudian menulis lanjutan tafsir al-Manâr Muhammad Abduh dengan bahasa yang teratur, sambil mengajar tafsir sampai akhir hayatnya tahun 1905. Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam...*, h. 69-74.

⁷ Zakaria Sulaimân Bayumi, *Al-Ikhwân al-Muslimûn wa al-Jamâ'ât al-Islâmiyah fi al-Hayât al-Siyâsah al-Miḥsriyah* (1928-1948), (Kairo: Maktabah Wahbah, 1979), h. 33.

⁸ Albert Hourani, *Thought in the Liberal Age, 1798-1939* (Oxford: Oxford University Press, 1962), h. 100-101.

munculnya slogan “Mesir untuk rakyat Mesir” untuk memisahkan Mesir dari kekuasaan Turki Usmani. Tapi usaha ini belum berhasil dan akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Ketaatan dan ketundukan ini sebenarnya hanya bersifat pragmatis.⁹ Sebagai perwujudan dari nasionalisme dapat dijelaskan bahwa ada beberapa partai yang dianggap cukup representatif untuk menggambarkan pandangan rakyat Mesir terhadap imperialisme Inggris dan Dinasti Turki Usmani, di antaranya ialah *Hizb al-Wathan* (Partai Nasionalis), *Hizb al-Ummah* (Partai Umat), dan Partai Khadive. Tokoh-tokoh Partai *Hizb al-Wathan* di samping merupakan eksponen nasionalisme territorial Mesir juga menganjurkan nasionalisme religius, sebab menurutnya agama dan nasionalisme adalah satu, dan (ta’âsub) fanatisme nasionalisme hanya dapat dipantau dengan ajaran-ajaran agama.¹⁰ Orang yang hatinya berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama, pasti akan memiliki rasa cinta yang tinggi pada tanah air dan akan mengorbankan harta dan hidupnya.

Berbeda dengan sikap tokoh-tokoh Partai Umat (*Hizb al-Ummah*) yang berpendapat bahwa agama berbeda dengan politik, mereka menganjurkan untuk melakukan negosiasi dengan

pihak asing, dalam hal ini Inggris, di samping kondisi Mesir masih terlalu lemah untuk melalukan konfrontasi dengan kekuatan yang begitu besar. Salah seorang tokoh partai ini adalah Luthfi al-Sayyid.

Setelah itu lahir partai-partai sekular yang sama sekali tidak peduli terhadap masalah-masalah agama, seperti Partai *al-Wafd* (Partai Rakyat Mayoritas), beberapa partai minoritas seperti Partai *al-Ahrâr al-Dusturiyûn*, Partai *al-Sa’diyûn*, Partai *al-Katlah al-Sa’diyah*, partai-partai istana seperti Partai *al-Ittihâd* dan *al-Sya’b* dan lain-lain. Kesemuanya menganut pandangan nasionalisme kedaerahan yang sempit.¹¹ Tidak ada lagi “payung” yang menghimpun umat Islam dibawah panji akidah, dan upaya menghidupkan kepemimpinan Islam “*al-khilâfah al-Islâmiyah*” dan memindahkan ke negeri lain mengalami kegagalan. Partai-partai politik yang ada saling bermusuhan dan sebagian partai sepakat untuk tidak sepakat sehingga diperalat oleh musuh-musuh Islam untuk memecah belah umat.¹²

¹¹ Yusuf Qardawi, *Sistem Kaderisasi Ikhwanul Muslimin*, terjemahan dari *al-Tarbiyah al-Islâmiyyah wa Madrasah Hasan al-Banna*, oleh Ghazali Mukri, (Solo: Pustaka Mantiq, 1992), h. 98.

¹² Yusuf Qardawi, *Al-Shahwah al-Islâmiyah baina al-Ikhtilâf al-Masyrû’ wa al-Tafarruq al-Madmûm* (Kairo : Dâr al-Shawah li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1990), h. 252. Terdapat 135 organisasi keagamaan pada saat itu, antara lain : Jamâ’ah al-Kasyâfah al-Ahliyyah al-Mishriyyah, Râbithah al-Islâh al-Ijtimâ’i, Jum’iyyah al-Ijtihâd al-Nisâ’i, Jum’iyyah al-Ta’âwuniyyah al-Manziliyyah, al-Jum’iyyah al-Ta’âwuniyyah li al-Bitrûl, al-Jum’iyyah al-Ta’âwuniyyah li Taurîdi al-Saqâwî, Al-Ikhwân al-Muslimûn al-Ta’lîm al-Ilzâmî, Jum’iyyah al-Muhansin al-Mulûkiyyah, Jum’iyyah Khârîjî al-Muslimûn (bukan organisasi keagamaan), al-Jum’iyyah al-Syar’iyyah li Ta’âwuni al-Muâmilîn bi al-Kitâb wa al-Sunnah al-Muhammadiyah, Jum’iyyah Makârim al-Akhlâq al-Islâmiyyah (didirikan sebelum PD I), Jum’iyyah al-Ummah wa al-Kitâb, Jum’iyyah al-Islâh al-Dînî, Jum’iyyah al-Khairiyah al-Islâmiyyah, Jum’iyyah al-Mawâṣal al-Islâmiyyah, Jum’iyyah al-’Ailât al-Asyâkir al-Bihârah, Jum’iyyah Ihyâ’ Mujiḥ al-Islâm, Jum’iyyah Ghazwât Badr, Jum’iyyah al-Wafa’ al-Islâmi, Jum’iyyah Nasyr al-Fadâ’il wa al-Âdâb al-Islâmiyyah, Jum’iyyah as-Syubbân al-Hijâziyyîn, Jamâ’ah al-Munâdab bi al-Shalâh, Jamâ’ah Ihyâ’ al-Qur’ân al-Karîm, Jum’iyyah Miṣr al-Fatât (didirikan pasca PD I), Jum’iyyah al-Râbithah al-Islâmiyyah (didirikan sebelum PD I), Jum’iyyah al-Ummah al-Muhâfazah alâ al-Qur’ân al-Karîm (didirikan pasca PD I), Jum’iyyah al-Urwa al-Wutsqâ al-Islâmiyyah, Jamâ’ah Anshar al-Sunnâh al-Muhammadiyah, Jum’iyyah al-Akhâ’ al-Islâmi, Jum’iyyah al-Muṣlîm al-Âmil, Jum’iyyah al-Taqwa, Jum’iyyah al-Shubbân al-Muslimîn, Jum’iyyah al-Ikhwân al-Muslimîn, Jum’iyyah al-Râbithah al-Islâmiyyah, Jamâ’ah Syabâb Muhammad, Jum’iyyah al-Akhwât al-Muslimah, Jum’iyyah al-Jihâd al-Islâmî,

⁹ Syahrin Harahap, *Al-Qur’an dan Sekularisasi: Kajian Kritis terhadap Pemikiran Thaha Husein* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1974), h. 22.

¹⁰ Abdullah al-Ahsan, *Ummah or Nation: Identity Crisis in Contemporary Moslem Society* (Markfield : United Kingdom of Islamic Foundation, Markfield Dakwah Centre, 1992), h. 42. Partai-partai tersebut memiliki beberapa karakteristik yaitu: *Pertama*, didominasi oleh pejabat tinggi negara dan para hartawan yang hanya memenuhi ambisi mencapai kekuasaan, *Kedua*, ikut serta dalam permainan kekuasaan dan pemilihan umum yang mengakibatkan habisnya potensi-potensi bangsa secara tidak proporsional, sebagai ganti dari usaha penyatuan segenap potensi untuk mewujudkan kemerdekaan. *Ketiga*, adanya tekanan pihak kolonial terhadap partai-partai tersebut, dimana mereka bersedia mendukung undang-undang konvensional dan sistem liberal yang berujung pada kekaguman terhadap pemikiran Barat dan gaya hidup sekularnya. Partai-partai tersebut merupakan representasi pemikiran asing. *Keempat*, setuju dengan semua perundangan dengan pihak kolonial dalam rangka mengalihkan pergumulan revolusioner rakyat selama tidak melanggar prinsip-prinsip ideologis. *Kelima*, tidak ada alasan bagi partai-partai kecil kecuali demi mendapatkan kekuasaan dan uang. Karenanya partai-partai tersebut dijadikan kendaraan politik oleh pihak istana untuk tujuan-tujuan politik negara semata. Lihat dalam Jum’ah Amin Abdul Aziz, *Zhurûf al-Nasy’ah wa Syakhshiah al-Imâm al-Mu’assis*, (Kairo: Dâr al-Tauzi’ wa al-Nasyr, 1992), h. 63.

Aspek politik ini tidak mendapat perhatian masyarakat Islam. Bahkan kelompok keagamaan berada di luar medan politik. Sehingga pengertian politik menjadi bertentangan dengan pengertian agama seperti warna putih dan hitam yang selamanya tidak akan pernah bertemu. Di Mesir saat itu muncul dikotomi antara tipe seorang agamis dan tipe politisi. Masing-masing tidak bisa dikompromikan. Kemudian muncullah gerakan keagamaan yang diprakarsai Hasan al-Banna dengan ide dan pemikiran keislamannya yang cemerlang.

Situasi semakin tidak stabil bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia II (Nopember 1918), dan dunia disibukkan dengan perbaikan kerusakan akibat perang tersebut. Semua kalangan menyerukan agar dibentuk perundingan damai internasional antara negara-negara yang bertikai. Akhirnya perundingan pun dilaksanakan di kota Paris Perancis. Masyarakat Mesir mengusulkan pembentukan tim delegasi politik ke perundingan tersebut untuk kepentingan pengajuan kebebasan. Namun gagal karena mendapat tekanan Inggris, dan mereka ditangkap.¹³ Spontan berita pengasingan

al-Muslimûn, h. 67. Lihat juga Tameem Ushama, *Hasan al-Banna*, h. 19-20. Lihat Duna Jeeha, *Religious and Political Trend in Modern Egypt* (Washington: 1950), h. 30.

¹³ Delegasi yang akan diutus ke perundingan tersebut adalah Sa'ad Basya Zaghlul (Pimpinan delegasi), Ismail Sabri Basya, Muhammad Mahmud Basya dan Hamd al-Bashil Basya. Mereka mendapat ancaman dari panglima perang Inggris, Jenderal Watson bahwa mereka akan diadili secara militer, tepatnya pada tanggal 6 Maret 1919 ditangkap dan diubung ke Pulau Malta di daerah Maditerania. Tanggal 22 September 1922, Pemerintah Inggris membentuk komite untuk melakukan investigasi terhadap sebab terjadinya revolusi. Berturut-turut demonstrasi digelar menentang kebijakan kolonial Inggris sampai diumumkannya deklarasi Mesir 28 Febuari 1922 yaitu berakhirnya perlindungan Inggris atas Mesir dan pengakuan kemerdekaan atas negara ini. Namun deklarasi ini hanyalah strategi Inggris belaka. Penobatan Sultan Fuad sebagai raja Mesir dengan gelar fuad I, otomatis Mesir menjadi kerajaan otonom yang tidak terkait dengan kesultanan Turki Utsmani. Selanjut dalam pembuatan Undang-undang tentang batasan kedaulatan rakyat dan kekuasaan raja, terjadi perdebatan antara pihak Sa'ad Zaghlul sebagai representasi nasionalis dengan Fuad I yang mewakili kekuatan politis. Dalam kondisi terpojok, raja mengeluarkan Undang-Undang 1923. Sehingga rakyat terbelenggu dan peluang campur tangan Inggris terbuka lebar. Sejak itu muncul situasi dimana Undang-Undang raja mengalami kepakuman sampai keluar keputusan raja 12 Desember 1935 tentang penghapusan Undang-undang 1930 dan kembali kepada Undang-Undang 1923. Lihat Jum'ah Amin Abdul Aziz, *Zhurûf al-Nasy'ah* (Mesir: al-Madaniyyah al-Islamiyyah, 2002), h. 40-46.

Zaghlul dan rekan-rekannya mendapat kecaman keras dan menyulut terjadinya revolusi di Mesir.

Kekerasan-kekeraan sering menimbulkan reaksi keras organisasi-organisasi keagamaan yang jumlahnya cukup banyak dalam aksi-aksi sosial, tapi tidak berhasil dan dapat dipadamkan. Pada tahun 1919, tepatnya ketika al-Banna berada di Kairo, ia menyaksikan beberapa demonstrasi pemuda Mesir. Mereka membawa bendera dan berdialog.¹⁴ Seluruh elemen masyarakat baik laki-laki maupun wanita mengamuk dan menuntut kebebasan serta kemerdekaan penuh, sebuah bukti bahwa kondisi masyarakat sudah tidak menentu, dan revolusi ini merupakan ungkapan eksistensi diri, seolah-olah bangsa Mesir ingin merasakan kemanusiaannya kembali. Aksi-aksi pembelaan ini terus mengalir sampai tahun 1922, al-Banna waktu itu sedang menekuni ilmu tasawuf dan ibadah dalam rangka menemukan keseimbangan hidup sehingga memberi kemudahan baginya ketika mengelola dan mengorganisir sebuah gerakan keagamaan.

Hasan al-Banna dan Pembentukan Gerakan

Salah satu dari berbagai gerakan keagamaan yang muncul di Mesir pada awal abad dua puluh-an masehi adalah Gerakan Ikhwanul Muslimin¹⁵ yang pendiriannya diprakarsai oleh Hasan al-Banna--seorang figur kharismatik, lahir di Mesir

(Kairo: Dâr al-Tauzî' wa al-Nasyr al-Islâmiyah, 2002), h. 40-46.

¹⁴ Tahun ini adalah tahun terjadinya peristiwa revolusi nasional pasca Perang Dunia Pertama, dimana ketika itu al-Banna masih remaja, usianya lebih kurang 12 tahun. Beberapa peristiwa revolusi telah membuka jalan masuk ke dalam jiwa dan perasaan al-Banna, padahal ia saat itu masih berstatus sebagai pelajar di Madrasah al-I'dadiyah di kota Mahmudiyah, dan termasuk pelajar yang dikenal di kalangan para demonstran. Ia pernah bercerita tentang dirinya, "Meski sibuk bergelut dengan tasawuf dan ibadah, aku berkeyakinan bahwa berbakti kepada negara merupakan jihad yang tidak bisa ditawar lagi. Maka sesuai dengan akidah dan kapasitasku sebagai pelajar, aku bertekad akan melaksanakan peranan nyata dalam pergerakan-pergerakan ini." Demikianlah al-Banna di usia remaja telah menjadi politikus yang penuh keikhlasan dan sosok nasionalis yang disegani diantara para sahabatnya, satu hal yang mengisyaratkan akan adanya peranan besar yang tengah menantinya dan ada tugas besar yang memanggilnya. Lihat Jum'ah Amin Abdul Aziz, *Zhurûf al-Nasy'ah...*, h. 42.

¹⁵ Ikhwanul Muslimin disebut juga *al-Ihkwân al-Muslimûn*. Terma yang sering digunakan dalam bahasa Inggris untuk gerakan ini adalah "*muslim brothers*" atau "*muslim brethren*", mengandung pengertian muslim bersaudara atau persaudaraan Islam di Negara Mesir.

pada tahun 1906.¹⁶ Beberapa guru--disamping ayah kandungnya¹⁷--telah memiliki peran cukup dominan terhadap pembentukan karakter dan perkembangan pemikirannya sehingga ia kelak begitu disegani tidak hanya di kalangan masyarakat Mesir, bahkan masyarakat luas di muka bumi.

Kehadiran Hasan al-Banna di Kairo bertepatan dengan masa gejolak politik dan intelektual serta situasi tidak stabil masyarakat yang menandai tahun 1920-an di Mesir. Ia menemukan problem politik yang menurutnya cukup serius: perebutan kekuasaan di Mesir antara Partai Wafd dan Partai konstitusi Liberal (*Ḥizb al-Ahrār al-Dustūriyyah*), hiruk pikuk perdebatan politik, yang menimbulkan perpecahan yang muncul pasca revolusi 1919.

Berangkat dari keyakinan bahwa masjid saja tidak cukup untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat luas, al-Banna mengorganisir sekelompok mahasiswa dari al-Azhar, dan Darul Ulum yang tertarik mengikuti pelatihan untuk berceramah dan penyuluhan. Beberapa mahasiswa setelah menjalani keprihatinan, didelegasikan ke seluruh pelosok Mesir untuk melaksanakan tugas-tugas dan profesi mereka, dan tidak hanya menyebarkan dakwah Islam, tetapi juga menyemaikan gagasan pembentukan gerakan Ikhwanul Muslimin.

Pengalaman-pengalaman awal telah menempa dan menyiapkan dalam diri al-Banna perasaan

tajam terhadap masalah komunitas muslim dan masyarakat pada umumnya, kemudian mencari bentuk aksi yang tepat untuk melindungi mereka dan peran yang dipegang dalam aksi tersebut. Beberapa jalur telah ditempuh melalui salah satu dari dua metode: *pertama*, metode sufisme yang lurus—keikhlasan dan aksi untuk kepentingan kemanusiaan. *Kedua*, metode pendidikan dan penyuluhan, dimana seseorang dituntut untuk berinteraksi dengan pihak lain. Ia memilih menjadi seorang penyuluh dan pendidik, mendedikasikan diri, membimbing masyarakat tentang tujuan agama dan sumber-sumber kehidupan serta kebahagiaan hidup di dunia. Beberapa sumber kekuasaan di masyarakat saat itu adalah ulama, syaikh ordo-ordo sufi, tokoh masyarakat lain (klan dan kelompok), dan perhimpunan sosial dan keagamaan, benar-benar menjadi lembaga penyeimbang bagi al-Banna dalam menyikapi persoalan-persoalan kemasyarakatan di Mesir.

Sebelumnya (menjelang akhir dia tinggal di Kairo), al-Banna menyusun esai seniornya, di sini ia membandingkan peranan sosial guru sekolah, dengan *syaiikh* sufi. Meski mengungkapkan apresiasi atas keikhlasan sufi, disiplin dan ibadahnya, al-Banna mengatakan bahwa keterbatasan pengaruh sufi ini disebabkan oleh sufi menarik diri dari masyarakat. Di lain pihak, guru setiap hari berhubungan dengan masyarakat. Ini memungkinkan guru mempengaruhi masyarakat lewat sistem pendidikan. Hubungan dengan masyarakat ini menjadikan guru mengungguli *syaiikh* sufi dan lebih mampu menyerang penyakit fundamental yang menimpa masyarakat terutama kaum muda.¹⁸

Walaupun ia meninggalkan kerangka institusional tasawuf, tetapi tetap memasukkan unsur-unsur pilihan tasawuf kepada Ikhwanul Muslimin, seperti: sikap patuh kepada seorang *syaiikh*, cara berzikir/ingat kepada Allah, dengan penuh *khusyû`* dan *khudû`* menunaikan kewajiban agama. Ia tidak menolak hubungan pribadi dengan Allah seperti diupayakan tasawuf, bahkan menemukan kerangka organisasi baru nantinya untuk upaya itu. Sebenarnya ia ingin membawa

¹⁶ Hasan al-Banna dilahirkan tepatnya pada bulan Oktober 1906 di *al-Mahmudiyyah*, sebuah kota kecil di propinsi Buhairah, kira-kira 9 mil dari arah barat daya kota Kairo. Hasan al-Banna adalah anak tertua dari lima bersaudara. Lihat Richard P. Mitchell, *The Society Of The Muslim Brothers* (London: Oxford University Press, 1968), h. 1.

¹⁷ Ayahnya bernama Ahmad Abdurrahman al-Banna, lebih dikenal dengan si tukang arloji dan penjilid buku. Juga mengarang beberapa kitab agama terutama dibidang ilmu hadits. Di antara karyanya adalah *al-Fath̃ al-Rabbâni*, *li al-Tartib al-Musnad Imâm Ahmad*, *Bada'î al-Musnad fî Jam'î wa Tartibi Musnad al-Syafi'i wa al-Sunan*, dan *Bulûgh al-Awani Asrâr al-Fath̃ al-Rabbâni*. sebagian besar kitabnya mengenai ikhtisar *al-Kutub al-Sittah*. Lihat dalam Bayûmî, *al-Ikhwân al-Muslimûn wa al-Jamâ'ât al-Islâmiyah*, h. 73. Ia tergolong berharta dan dihormati, lahir di Distrik Syamsiroh tepatnya di bagian Fuh. Syaikh Ahmad sangat akrab dengan sejumlah ulama. Ketika penduduk di desanya membangun masjid, ia diminta untuk menjadi imam salat Jumat pertama. Ia memiliki perpustakaan dengan berbagai literatur agama, seni, dan ilmu pengetahuan lainnya. Lihat *Muallim al-Husni: The Muslim Brothers*, h. 26-27.

¹⁸ Ali Dahmani, *Dasar-Dasar Tasawuf* (Bandung: Mizan, 1997), h. 100.

masyarakat Mesir kembali kepada ajaran Islam sejati. Makanya, di samping mengajar di sekolah, al-Banna aktif berdakwah. Selalu mengadakan hubungan dengan khalayak ramai di kedai-kedai kopi dan mengajak mereka secara persuasif menuju masjid. Sambil berusaha untuk menghindarkan dan mendamaikan konflik yang sering terjadi di kalangan masyarakat pada waktu itu.

Al-Banna yang dikenal memiliki dedikasi tinggi ini, menyelesaikan studinya di Darul Ulum pada musim panas tahun 1927, dan pada bulan September berikutnya menjalankan tugas fungsional sebagai guru pemerintah di sebuah Sekolah Dasar sekitar wilayah Zona terusan Suez di kota Ismailiyah. Belum ditemukan data yang menunjukkan, apa yang menghalangi al-Banna kemudian tidak melanjutkan studi ke luar negeri. Dan sebaliknya, tidak dapat dibayangkan, bila ia melakukan hal tersebut.

Kesibukannya dengan lingkungan baru ini tidak membatasi ruang gerak hubungan al-Banna khususnya dengan teman-teman terdahulu yang se-ide dalam aktifitas dakwah Islam dan dengan beberapa perhimpunan Islam di Kairo, salah satunya adalah *Jam'iyah al-Syubbân al-Muslimîn*—sebuah gerakan keagamaan konservatif yang didukung pembentukannya oleh al-Banna, sekaligus bertindak sebagai agen lokal *Majalah al-Fath*.¹⁹ Persoalan yang kemudian dihadapi dengan kasat mata adalah dominasi Inggris atas fasilitas-fasilitas publik dan keberadaan rumah-rumah mewah milik Asing berhadapan langsung dengan rumah-rumah buruh yang kondisinya sangat menyedihkan.

Tepatnya pada bulan Maret 1928 pasca pembentukan *Jam'iyah al-Syubbân al-Muslimîn* di kota Kairo, enam orang mendatangi dan sepakat menunjuk Hasan al-Banna untuk menjadi pemimpin mereka, seraya berikrar untuk menjadi pengikut setia membela agama Allah dan hidup untuk kepentingan dakwah Islam.²⁰ Maka terbentuk

sebuah gerakan yang kemudian dinamakan al-Ikhwân al-Muslimûn atau Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Perkembangan Gerakan Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin, sebuah gerakan keagamaan di Mesir yang beberapa dekade berikutnya menyandang predikat “*mainstream*” gerakan, bukanlah merupakan “*total break*” dari ide dan gerakan kebangkitan sebelumnya, seperti Jamaluddin al-Afghani, Rasyid Ridha, Muhammad Abduh dan beberapa ulama lain. Apalagi al-Banna misalnya sebagai pendiri Gerakan Ikhwanul Muslimin, telah menyatakan dirinya sebagai pengikut atau penganut “*Gerakan Salafiyah*” Muhammad Abduh.²¹ Singkatnya, Ikhwanul Muslimin kemudian menemukan basis awal gerakannya di kota Ismailiyah dan bertahan hingga tahun 1932 sebelum menyatakan kepindahannya ke kota Kairo.

Di kota ini, al-Banna bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat Ismailiyah dan sekitarnya. Melalui lembaga masjid dan sekolah, ia mulai mensosialisasikan diri—seperti dikemukakan dalam esai terakhir yang ditulisnya sendiri— bahwa al-Banna tidak hanya memberi pelajaran di sekolah pada siang hari, tetapi juga memberi materi pelajaran pada masyarakat umum

asing yang selama ini menjadi pengikut atau murid-murid Hasan al-Banna. Enam orang tersebut adalah Hafiz Abdul hamid, Ahmad al-Hashari, fuad ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz dan Zakki al-Maghribi. Hasan al-Banna, *Mudzâkarât al-da'wah li al-Imâm al-Syahîd Hasan al-Banna*, (Kairo: Dâr al-Tauzî' wa al-Nasyr al-Islâmiyah, 1966), h. 83.

²¹ Adapun hubungan al-Banna dengan madrasah Muhammad Abduh telah terjalin lama, karena ayah al-Banna adalah ayah dari murid Muhammad Abduh, dan al-Banna sendiri telah membaca majalah al-Manâr. Pada masa mudanya, al-Banna sering mendatangi tokoh-tokoh pengikut Muhammad Abduh seperti Farid Wajdi dan Ahmad Taimur dan musthafa al-Maraghi. Bukti lain menunjukkan bahwa seperti yang tertera dalam katalog buku berjudul *al-Qir'at al-Qur'âniyah, Tafsîr al-Manâr* ditempatkan sebelum *Ibnu Katsîr*, di samping *Tafsîr al-Fâtihah* karya al-Banna sendiri. Risalah tauhid Muhammad Abduh menempati posisi teratas di antara kitab-kitab lainnya dalam daftar kajian akidah secara umum. Adapun kaitannya dengan al-Afghani, hal itu dirasakan oleh para paengikut Ikhwan dan mereka menganggap al-Afghani adalah moyang gerakan Ikhwanul Muslimin. Para pengikut Ikhwan sering kali menyebut sisi positif perjuangan al-Afghani khususnya dalam membela agama dari kerusakan internal dan konflik dengan pihak luar. Abdul Aziz, *Aurâq min Târikh al-Ikhwân al-Muslimîn: Zhurûf al-Nasb*, h. 111.

¹⁹ Yang memimpin gerakan keagamaan ini ialah Muhibudin al-Khatib, salah satu anggota badan pendiri . Ia juga menjabat sebagai direktur toko buku salafiyah di kota kairo. Uraian ltnkgap tentang tokoh ini telah diurai dalam bahasan terdahulu. Lihat lagi dalam Abdul Aziz, *Zhûrûf al-Nasy'ah...*, h. 182-183.

²⁰ Enam orang tersebut adalah penerus buruh penyediaan

di malam hari, khususnya orang tua wali siswa yang sebagian besar berprofesi buruh, pedagang kecil, dan pegawai pemerintah.

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai untuk membuat solid gerakan adalah memperluas jaringan keanggotaan dan kemudian melakukan koordinasi. Al-Banna dan para Ikhwan mengejar tujuan ini dengan mengadakan kontak langsung, dan tour ke berbagai daerah di luar kota Ismailiyah pada hari libur mingguan dan selama liburan akhir tahun, mengadakan ceramah di masjid, juga di rumah-rumah, klub-klub, dan tempat-tempat pertemuan publik lainnya. Penggunaan masjid sebagai sentral gerakan, membuat penceramah mempunyai legitimasi dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Dalam waktu singkat lebih kurang empat tahun, bertambah banyak kantor cabang Ikhwanul Muslimin sepanjang tepi timur Delta di Ismailiyah, Port Sa'id, Suez, dan Abu Suwair, dan di tepi barat Delta sejauh Syubra Khit.

Di Ismailiyah, untuk kepentingan sentral aktivitas gerakannya, Ikhwanul Muslimin mengambil sebuah rumah sederhana sebagai kantor sekretariat. Bantuan finansial perusahaan (Terusan Suez) dan pinjaman dari pedagang lokal cukup membantu penyelesaian pembangunan masjid pada tahun 1930. Kemudian dibangun sebuah sekolah putra, sebuah klub dan sebuah sekolah putri. Semua cabang baru Ikhwanul Muslimin dibangun dengan cara yang sama: pembangunan kantor sekretariat diikuti dengan pembangunan proyek lainnya—masjid, sekolah, klub, industri rumah—yang bertujuan sebagai pusat kepentingan atau pusat kegiatan masyarakat.²²

Seperti yang pernah dialami beberapa gerakan, juga terjadi pada gerakan Ikhwanul Muslimin, yaitu muncul sikap antipati dan perlawanan terhadap kebijakan pengembangan gerakan ini, atau bahkan tekanan hegemoni berkuasa, dalam hal ini Pemerintah Mesir dan

kelompok imperialis secara tidak langsung—diramalkan akan terjadi di tahun-tahun terakhir peradaban Ikhwanul Muslimin dalam skala yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh al-Banna sekalipun. Beberapa tuduhan diarahkan kepadanya oleh pihak-pihak tersebut.²³ Persoalan internal di kalangan Ikhwanul Muslimin yang sempat mencuat ke permukaan adalah polemik tentang pemilihan wakil pengganti pemimpin gerakan ini di Ismailiyah menjelang mutasi al-Banna ke kota Kairo—sebuah peristiwa yang pertama kali terjadi dalam gerakan ini.²⁴ Kenyataan ini menggugah

²³ Diantaranya adalah: (1).Tuduhan bahwa al-Banna disinyalir sebagai seorang yang beraliran komunis dan mempergunakan dana dari komunis untuk melakukan gerakannya, (2) al-Banna adalah pendukung partai Wafd yang bertindak melawan pemerintahan Sidqi; (3) al-Banna dituduh penjahat yang mengkhianati kepercayaan masyarakat, karena telah menyalahgunakan dana yang terkumpul untuk kepentingan pribadinya. Al-Banna diinvestigasikan oleh menteri pendidikan atas perintah Perdana Menteri tetapi ia dibebaskan dari sepuluh tuduhan. Investigasi itu menyebabkan pemerintah Sidqi Pasha menaruh perhatian terhadap gerakan keagamaan Ikhwan, sehingga kemudian pemerintah memiliki banyak peranan dalam perjalanan sejarah organisasi ini. Mitchell, *The Society...*, h. 8.

²⁴ Di tengah-tengah polemik tentang persoalan tersebut, pembantu dekat al-Banna memintanya untuk menyebutkan seorang pengganti. Calon yang ditunjuk disepakati dalam sidang umum yang diselenggarakan di dalam masjid Ikhwan. Sebagian kecil yang disebut oposan menolak keputusan tersebut, dan mulai membisikan kampanye melawan calon yang baru. Mereka berargumentasi bahwa sidang itu tidak sah karena tidak semua anggota hadir. Al-Banna kemudian mendiskusikan masalah ini dengan pihak, spontan dengan tawaran yaitu mengadakan pemilihan ulang dalam sebuah pertemuan yang diumumkan secara luas, tetapi al-Banna menuntut kesediaan mereka untuk mentaati keputusan sidang dan mereka pun menerima tuntutan tersebut. Meskipun demikian, saat pertemuan kedua diselenggarakan, pilihan anggota jatuh kepada calon yang diajukan al-Banna. Para oposan mempergunakan cara lain: *Pertama*, mereka menyebarkan isu bahwa pemimpin terpilih bukan pemimpin yang baik, sehingga Ikhwanul Muslimin dalam kondisi kritis, khususnya masalah hutang dan tanggungan gerakan. Al-Banna kemudian memanggil para kreditor Ikhwanul Muslimin. Ketika tindakannya diketahui, banyak donator yang membantu dan kemudian segala sesuatunya teratasi. Para kreditor berjanji akan melunasi hutangnya. Kenyataannya masih ada tuduhan lain tentang penyalahgunaan dana dengan mendistribusikan dana tersebut ke kantor-kantor cabang baru, termasuk kantor cabang yang dipimpin oleh saudaranya di Kairo. Tapi al-Banna bebas dari tuduhan tersebut. Akhirnya al-Banna menyimpulkan bahwa orang-orang ini telah kehilangan kesadaran tentang ketinggian nilai dakwah Ikhwan dan kepercayaan terhadap pemimpin, sehingga mereka harus dipecat dari keanggotaan. Sebelum al-Banna bertindak, mereka sudah mengundurkan diri terlebih dahulu, dan kemudian mereka menyebarkan

²² Setelah itu, pasca pembangunan masjid, didirikan sebuah sekolah putra dan satu klub serta sebuah sekolah putri. Semua cabang-cabang baru dibangun dengan metode penggalangan dana yang sama: kantor sekretariat dan beberapa proyek atau lainnya—masjid, sekolah, klub, industri rumah—yang bertujuan sebagai pusat kepentingan atau pusat kegiatan masyarakat. Hasan al-Banna, *Mudzâkarât al-Dawlah*, h. 22.

al-Banna untuk melakukan tindakan yang bijak dan tentunya dapat diterima oleh semua pihak, baik para ikhwan dan yang non-ikhwan.

Fenomena ini sedikit banyak berpengaruh terhadap perkembangan gerakan ini menuju puncak kekuatan dan prestasi sejarah yang diinginkan. Maka sebagai pemrakarsa sebuah gerakan keagamaan, al-Banna dituntut berfikir lebih optimal dan mencari langkah-langkah yang efektif dan strategis, sehingga gerakan ini menjadi solid, tidak rapuh, stabil dan menguat atau bahkan memiliki akarnya di beberapa wilayah pergerakan, utamanya di Ismailiyah. Hal ini mutlak harus dilakukan, mengingat situasi masyarakat Mesir yang homogen dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi. Bila diklasifikasi, terdapat tiga stratifikasi sosial yang berbeda jauh, kelompok elit terdiri dari penguasa dan aristokratis yang berorientasi Barat, kelompok menengah terdiri dari ulama dan menengah lainnya, dan kelompok bawah terdiri dari petani, buruh, pedagang kecil dan lainnya. Dalam perspektif gerakan keagamaan, masyarakat sebagai obyek diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok umum dan kelompok khusus.²⁵

Al-Banna dan para ikhwan—disebut sebagai kelompok inti gerakan—kemudian melangkah lebih ekspansif dalam mengembangkan gerakan, yaitu menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa pihak di luar wilayah Ismailiyah. Setelah empat tahun, gerakan keagamaan yang dipimpinya sudah menjalin hubungan dengan *Asosiasi Kebudayaan Islam* di kota Kairo, yang dipimpin oleh Abdurrahman al-Banna, salah

rahasianya, dan yang paling penting, tidak adanya kebebasan berpendapat dalam Ikhwan. Disebut setelah mutasi ke Kairo, beberapa orang di antara mereka mencoba mendiskreditkan al-Banna di hadapan kepala sekolah tempat mengajarnya yang baru. Para pendukung al-Banna memukul para penghasut tersebut dan akibatnya mereka diajukan ke pengadilan, dan para pendukung al-Banna itu dibebaskan dari segala tuduhan. Lihat Mitchell, *The Society...*, h. 9-10.

²⁵ Kelompok umum disebut juga umat dakwah, yaitu semua lapisan masyarakat yang pemahaman keislamannya sangat dangkal dan enggan menerima Islam sebagai pedoman dasar hidup. Adapun kelompok khusus disebut umat Ijabah, yaitu mereka yang memeluk Islam dan telah menyatakan sikap respons dan siap mendukung. Abdul Munir Mulkan, *Ideologisasi Gerakan Dakwah: Episode Kehidupan M. Natsir dan Akbar Baswir* (Legiokarya: Singapura, 1996), h. 5.

seorang adiknya dan juga anggota Ikhwan, yang bekerja di Kairo setelah ia meraih gelar Diploma Sekolah Tinggi Perdagangan. Kedua organisasi ini, *al-Ikhwân al-Muslimûn* dan Asosiasi Kebudayaan Islam melebur menjadi satu untuk membentuk cabang pertama Ikhwan di Kairo. Penggabungan tersebut memberi akses organisasional bagi Ikhwanul Muslimin dalam ‘lingkaran Islam’ di ibu kota. Hampir seluruh anggota perhimpunan di Kairo dengan cepatnya menjadi pimpinan Ikhwan dalam setting perkotaan yang baru.

Kebijakan menjalin kerja sama dan bergabung dengan beberapa perhimpunan di Kota Kairo sebagaimana dikemukakan, memberi jalan atau langkah awal operasional yang bagus bagi Ikhwan. Al-Banna dan para ikhwan pun memilih kota Kairo sebagai sentral kegiatan dan pengendali gerakan Ikhwanul Muslimin.

Standar lain untuk mengukur perkembangan Ikhwanul Muslimin sebagai sebuah gerakan yang sangat diperhitungkan adalah: *pertama*, ketetapan meposisikan kantor sekretariat gerakan di pusat kota Kairo. Dari bentuk bangunan sederhana di kawasan ramai menjadi bangunan megah dengan halamannya di jalan utama, lengkap dengan sekretaris dan staf-staf administrasi yang bekerja *full time* dan digaji. *Kedua*, ide strategis membentuk wilayah dan beberapa muktamar, mulai dari muktamar nasional berkala, muktamar regional, muktamar khusus (mahasiswa, pimpinan cabang, dsb) hingga muktamar rakyat khusus tentang pembebasan imperialisme²⁶ yang diadakan secara berkala untuk mendiskusikan dan merencanakan program, mengesahkan program, dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Muktamar-muktamar ini juga menggambarkan potret kegiatan Ikhwan

²⁶ Di dalam berbagai muktamar tersebut disampaikan berbagai orasi, diskusi, dan tukar pikiran yang berakhir dengan voting berbagai keputusan. Muktamar tersebut merupakan sarana yang baik bagi partisipasi ikhwan dalam mengambil berbagai keputusan yang menyangkut masalah mendasar masyarakat. Jumlah peserta yang hadir dalam muktamar menunjukkan bahwa Ikhwan telah membuka kesempatan bagi masyarakat Mesir dalam kehidupan politik bangsa mencapai setengah juta jiwa. Utsman Abdul Muis Ruslan, *al-Tarbiyah al-Siyâsiyah 'inda al-Jama'ah al-Ikhwân al-Muslimîn fi al-Fathrah min 1928 ilâ 1954 fi Mishr*, (Kairo: Dâr al-Ta'uzi' wa al-Nashr al-Ilâmîyah, 1982), h. 288.

secara umum selama rentang waktu 1932-1939.

Muktamar I, diselenggarakan pada bulan Mei 1933. Agenda utama yang dibahas adalah berkaitan dengan problem kegiatan kristenisasi dan upaya-upaya penanggulangannya.²⁷ Muktamar II, diselenggarakan pada tahun 1934, membahas propaganda penyebarluasan dan pengajaran, dan memberi wewenang kepada sebuah perusahaan kecil untuk mendirikan lembaga penerbitan Ikhwanul Muslimin.²⁸ Muktamar IV diselenggarakan untuk memperingati penobatan raja Faruq pada tahun 1937.

Adapun Muktamar III dan V yang diselenggarakan pada bulan Maret 1935 dan Januari 1939 merupakan pertemuan penting keorganisasian. Muktamar III, Maret 1935, diselenggarakan sebagai respons langsung terhadap pertumbuhan jumlah anggota, membahas tentang seperti apa kriteria (syarat) dan tanggung jawab keanggotaan, dan hirarki dan struktur organisasi gerakan keagamaan. Lebih khusus lagi, Muktamar ini mengesahkan aturan pembentukan kepanduan (*jawwalah*) yang secara berkala mengembangkan pendidikan dan pelatihan olah raga dimulai sejak hari-hari pertama gerakan ini di Ismailiyah.

Setelah pembentukan kepanduan Ikhwan, pada tahun 1937 dibentuk pula sistem batalion

²⁷ Sepucuk surat telah dikirimkan kepada Raja Fuad yang menyampaikan tentang keyakinan para ikhwan, dan usulan untuk para anggota melakukan kontrol terhadap lembaga missionaries Kristen. Mitchell, *The Society...*, h. 18.

²⁸ Keputusan ini diikuti dengan mendirikan penerbitan resmi pertama Ikhwan: *pertama*, majalah mingguan *Majallat al-Ikhwân al-Muslimîn*; *kedua*, majalah mingguan *Majallat al-Nadzir*. Lembaga penerbitan ini juga menerbitkan apa yang nantinya menjadi teks-teks indoktrinasi paling penting bagi para anggota—dan sampai tahun 1948 menjadi sumber utama untuk mengkaji pemikiran gerakan ini yaitu *al-Rasâ'il* (Risalah Pergerakan al-Banna). Ditulis oleh al-Banna, risalah-risalah ini mereproduksi dan menyimpulkan komunikasi Ikhwan secara luas dengan pemerintah Mesir tentang situasi masyarakat Mesir dan metode reformasi, atau berisi pesan-pesan untuk para anggota tentang suatu gagasan, kewajiban, dan tanggung jawab para anggota. Ikhwan juga dengan cepat mulai melembagakan komunikasi lisan dengan melembagakan ceramah mingguan untuk semua level di kantor cabang, dan dengan melembagakan ceramah dan khutbah di masjid dan di tempat-tempat pertemuan umum. Problem pemenangan (perekrutan) pengikut bagi al-Banna merupakan tahap pertama yang dilalui ikhwan, yaitu tahap propaganda, komunikasi dan informasi. Mitchell, *The Society...*, h. 18.

(*katâ'ib*), juga dengan tujuan menempa innerloyalitas dalam gerakan Ikhwan dan menyediakan instrumen-instrumen guna melaksanakan gagasan ikhwan. Muktamar V, Januari 1939, memberi perhatian terhadap pertanyaan tentang orientasi formasi internal. Al-Banna melukiskannya sebagai tahapan kedua Ikhwan, yaitu tahapan pembentukan, seleksi dan persiapan. Muktamar ini dia adakan juga dalam rangka memperingati diesnatalis Ikhwan yang ke-10. Dalam momentum ini dibahas materi tentang pondasi ideologi Ikhwan dan substansi gerakan keagamaan ini untuk sepuluh tahun mendatang.²⁹

Dalam rangka kerja ini, al-Banna menjelaskan kepada para anggota wilayah gerakan di mana mereka menjadi bagian: Gagasan Ikhwan mencakup semua kategori reformasi, dalam terma yang khusus, al-Banna mendefinisikan gerakan Ikhwan sebagai pembawa pesan Salafiyah, jalan Sunni, keberanian Sufi, organisasi politik, kelompok olah raga, persatuan kebudayaan-pendidikan, perusahaan ekonomi, dan ide-ide sosial. Diantara prinsip-prinsip Ikhwan yang menonjol adalah menghindari segala bentuk perdebatan doktrinal, tokoh terkemuka dan nama, dan partai atau kelompok; ia hanya konsern pada organisasi, program dan aksi; dan perhatian yang terus menerus terhadap perkembangan yang berkelanjutan. Lebih lanjut al-Banna menegaskan sikap gerakan terhadap kekuasaan dan pemerintah, konstitusi, hukum, nasionalisme dan arabisme.³⁰

Al-Banna telah menjadikan masalah ini sebagai prinsip dasar Ikhwan untuk menghindarkan diri dari konflik, baik internal maupun eksternal. Menurutnya, ketika berhadapan dengan mereka yang gelisah dan tidak sabar, bahwa kesuksesan

²⁹ Ide-ide dalam Muktamar V tersebut meliputi definisi Islam dalam perspektif Ikhwanul Muslimin yaitu, *Pertama* adalah Sistem yang menyeluruh dalam kehidupan manusia. Islam mengatur seluruh urusan manusia di dunia dan akhirat. *Kedua* Islam yang diformulasikan didasarkan kepada dua sumber utama yaitu Alquran dan al-Sunnah. Bila berpegang teguh kepada keduanya, maka *Ketiga* Islam dapat diterapkan pada semua zaman dan tempat. Al-Banna, *Risâlah al-Mu'tamar al-Khamis, dalam Majmû'ah Rasâ'il Hasan al-Banna*, (Beirut: al-Mu'assasah al-Islamiyah li al-Thaba'ah wa al-Shahafah wa al-Nashr, 1986), h. 152-155.

³⁰ Mitchell, *The Society...*, h. 18.

hanya dapat diraih dengan kesabaran dan perencanaan yang matang. Aksi bukan kata-kata, persiapan bukan slogan, untuk menjamin tercapainya sebuah kemenangan. Sebuah statemen singkat disampaikan di hadapan para Ikhwan dalam risalah yang terkenal:

“Ketika kalian sudah memiliki 300 batalion, dan telah siap secara spiritual dengan keimanan dan akidah, secara intelektual dengan ilmu dan peradaban, secara fisik dengan aneka latihan dan olah raga. Saat itu kalian mengajakku untuk menyelami kedalaman laut, menerobos awan di langit, dan memerangi setiap tirani yang beringas. Insya Allah aku akan datang bersama kalian”.

Dalam sebuah kasus misalnya, hubungan baiknya dengan Ali Mahir—yang diyakini secara luas telah menyalurkan sejumlah bantuan dana gerakan Ikhwanul Muslimin—mendorong kelompok pembelot untuk menuntut pemecatan Ahmad al-Sukkari, yang belum lama tinggal di Kairo dan berperan sebagai deputi al-Banna. Sukkari, yang dianggap sebagai fokus permasalahan hubungan dengan Mahir, telah berperan sebagai penghubung tidak resmi antara kedua tokoh ini.

Sekalipun bisa diredam untuk sementara waktu, masalah ini tidak pernah benar-benar terselesaikan. Beberapa anggota memahami komitmen ini secara harfiah, didorong oleh penekanan Ikhwan dalam kedisiplinan dan pelatihan, baik fisik, spiritual maupun moral. Seiring dengan semakin kuatnya gerakan Ikhwanul Muslimin, dan melembagakan kekuatan itu dalam sistem kepaduan dan batalion Ikhwan, beberapa anggota cenderung menuntut untuk segera direalisasikan misi Ikhwan. Antara tahun 1937 sampai dengan 1939, beberapa anggota Ikhwan satu persatu keluar dari organisasi ini karena sikap tidak puas terhadap sikap al-Banna dalam masalah ini, ada yang melihatnya sebagai ketidakkonsistenan al-Banna dengan ajaran Ikhwan. Bahkan seorang diantara mereka ada yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap Hasan al-Banna. Pada tahun 1939 kemarahan yang memuncak terhadap politik dan penggunaan dana Ikhwan baik di Mesir

maupun di Palestina, dan penolakan al-Banna yang berkelanjutan untuk mendukung penggunaan kekuatan dalam reformasi membuahkan gerakan pemisahan diri dari Ikhwan. Sikap puritan yang kaku dari kelompok baru yang memisahkan diri adalah *Jumiyat Syabab Sayyidina Muhammad*. Kenyataannya masalah ini masih tetap mengganjal sehingga muncul kembali pada tahun 1940, yang menyebabkan gelombang penyeberangan yang lebih besar menuju kelompok yang lebih baru. Yang paling menonjol dari gelombang penyeberangan ini adalah penyeberangan Mahmud Abu Zaid, editor Majalah *al-Nadzir* yang mengambil alih majalah dan izin penerbitan majalah tersebut.

Meskipun cukup signifikan, dan merepotkan al-Banna, pembelotan yang terjadi pada tahun 1939 dan problem yang ditimbulkannya, sama sekali tidak memperlambat kemajuan Ikhwanul Muslimin, baik dilihat dari jumlah anggota maupun pengaruhnya di masyarakat. Kecenderungan pemikiran ataupun struktur gerakan ini masih terpendam selama sepuluh tahun pertama, kehidupan Ikhwan mulai menampakkan diri dan mengambil bentuk yang pasti. Hampir tidak terasa, di tengah-tengah rasa putus asa dengan kekacauan pada tahun-tahun ini, Ikhwan berkembang menjadi sebuah kekuatan yang mampu memainkan peranan dalam kehidupan pasca perang di Mesir.

Ikhwanul Muslimin dan Politik Kenegaraan Mesir

Mesir, sejak kedatangan kelompok imperialis pada pertengahan abad sembilan belas masehi yaitu bulan September 1882 dan Juli 1883 menunjukkan situasi yang kurang kondusif dan jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Akidah dan syari’ah yang semestinya menduduki supremasi tertinggi, kini telah bergeser dan berkiblat ke Barat, dalam hal ini Perancis.³¹

³¹ Belum genap satu tahun, sejumlah pengadilan swasta didirikan yang mayoritas hakimnya bukan orang-orang mesir. Undang-undang Perancis diterjemahkan hampir secara harfiah. Maka jadilah Undang-undang Perancis menjadi rujukan untuk menyusun aturan-aturan sipil, perniagaan dan Undang-undang pidana. Sebaliknya Undang-undang perancis belum tidak

Dalam sistem politik sekalipun perubahan itu terjadi dan hal ini sangat dirasakan dampaknya kemudian. Pemerintah berkuasa yang diharapkan sebagai representasi masyarakat luas, kenyataannya tidak bersikap demikian, cenderung mengadopsi ide-ide politik Barat tanpa mencernanya terlebih dahulu. Bahkan Naubar Basya al-Armani ketika menjabat sebagai perdana menteri, mengangkat seorang sekretaris yang berkebangsaan Perancis.³² Kebijakan ini menafikan ketetapan hukum Islam sekaligus berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup bernegara bagi komunitas muslim.

Kenyataan ini berlangsung cukup lama dalam sejarah pemerintahan Mesir, bahkan sampai munculnya gerakan Ikhwanul Muslimin yang diprakarsai pembentukannya oleh Hasan al-Banna. Gerakan ini disinyalir sebagai gerakan paling kuat dan paling fenomenal, yang beraktifitas secara intens menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam.

Menurut al-Banna, seperti yang termaktub dalam risalah muktamar keenam: “Kami adalah politisi, dalam pengertian kami peduli terhadap permasalahan umat. Kami meyakini bahwa kekuatan eksekutif merupakan bagian dari ajaran Islam, masuk dalam bingkainya dan bergerak dalam naungan hukum-hukumnya. Bahwa kebebasan berpolitik dan kebanggaan berbangsa merupakan salah satu pilar Islam dan kewajibannya. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menyempurnakan kemerdekaan dan dalam rangka memperbaiki manajemen eksekutif. Demikianlah kita bekerja dan berada di bawah naungan hidayah Islam”.

dipergunakan kecuali untuk urusan-urusan perdata seperti nikah, perceraian, penetapan Nasab, mahar dan nafkah. Lihat dalam Taufiq Yusuf al-Wa'i, *Pemikiran Politik Kontemporer al-Ikhwân al-Muslimîn; Studi Analitis, Observatif, Dokumentatif*, terjemahan dari *al-Fikr al-Siyâsi al-Mu'âshir 'inda Ikhwân al-Muslimîn; Dirâsat Tahliliyat Maidaniyât Muwâtsaqât*, oleh Wahid Ahmadi, dkk., (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 33.

³² Sekretaris ini bernama Ustadz Manuri yang sebelumnya bekerja sebagai pengacara di Iskandariyah. Dalam menjalankan tugasnya, Manuri tidak banyak berinisiatif kecuali sedikit. Ia banyak menukil dari Perancis sejumlah Undang-undang bernama “Undang-undang Napoleon”. Undang-undang dibuat dalam Bahasa Perancis, kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab dan diberlakukan pada tahun 1882.

1. Selama Perang Dunia II (1939 - 1945 M)

Perang dunia ke-II terjadi pada bulan September tahun 1939 M antara Inggris-Perancis melawan Jerman setelah pihak Jerman menolak menarik diri dari Polandia. Negara ini telah melakukan invasi militer beberapa hari sebelum peristiwa perang tersebut.

Situasi genting ini mendorong Inggris untuk lebih mempererat hubungan dengan Mesir karena ingin mendapatkan dukungan Negara ini yaitu melibatkan diri dalam kancah peperangan. Masyarakat Mesir yang telah banyak merasakan kepahitan akibat dominasi dan eksploitasi kolonial Inggris terutama dalam aspek ekonomi dan politik tidak menentukan sikap terhadap ajakan perang tersebut. Akan bertolak belakang dan menyalahi kesepakatan masyarakat selama ini bersikap netral karena menyangkut beberapa faktor internal demi kelangsungan masa depan Mesir. Ajakan Inggris ini merupakan bukti sifat tamak kolonial yang hanya mementingkan mereka sendiri, tanpa peduli terhadap kondisi wilayah jajahan. Adapun pihak istana juga memiliki sikap yang sama bahkan memberi kebijakan untuk segera menyusun kekuatan militer sebagai langkah antisipatif terhadap beberapa kemungkinan.

Karena tuntutan duta Inggris di Mesir, Ali Maher memberlakukan peraturan perang segera setelah pembentukan kabinet. Ia menobatkan dirinya menjadi komandan militer. Harian, jurnal dan majalah yang terbit di kala itu diperketat sensorinya. Parlemen pada kesempatan musim panas tetap dituntut untuk melaksanakan peraturan ini. Partai Hizb al-Ahrar al-Dusturiyin menyambut baik deklarasi ini. Partai Wafd mengambil sikap abstain untuk menghindari benturan dan konflik dengan kolonial Inggris. Partai *Hizb al-Wathan* bekerja sama dengan departemen. Tanpa deklarasi formal pun Mesir telah melibatkan diri dalam kancah peperangan. Ini semua karena tuntutan di samping langkah-langkah terampil Jerman pada awal-awal peperangan.

Al-Banna melalui gerakan Ikhwanul Muslimin, menuntut semua pihak yang terlibat untuk mentaati isi perjanjian tahun 1936 M yang telah

disepakati sebelumnya. Pengangkatan duta Mesir untuk Inggris tidak dapat diterima masyarakat muslim Mesir. Pemerintah menurut Ikhwan harus segera melakukan reformasi internal ketimbang menyalakan sumber kekayaan alam untuk sesuatu yang tidak penting dan melibatkan diri dalam perang tersebut.³³

Pada awal kepemimpinan Hassan Sirri, setelah kematian Hassan al-Sabri pada bulan November 1940, Gerakan Ikhwanul Muslimin meningkat lebih jauh dan bertambah kokoh struktur kepengurusannya. Al-Banna kemudian melantik Muhammad Labib sebagai Inspektur Jenderal cabang al-Jawalah (Lembaga Pengamat/ Penyelidik) dan juga mendirikan Dewan Tinggi (*Supreme Council*) sebagai lembaga konsultasi. Akibatnya al-Banna kemudian diasingkan ke kota Qina, daerah utara Mesir dekat Sudan pada tanggal 20 Mei 1941,³⁴ dan wakilnya diasingkan ke Damietta.³⁵ Karena dianggap berbahaya dan menguntungkan pihak Italia. Tapi kemudian dipulangkan kembali ke kota Kairo.³⁶ Al-Banna dan para Ikhwan terus berjuang mengajak pihak pemerintah untuk kembali kepada aplikasi ajaran-ajaran Islam. Mesir pada saat itu tak ubahnya boneka Inggris.

Inggris tetap melanjutkan intervensi ke dalam pemerintahan Mesir dan mengusulkan dilakukannya langkah-langkah negatif terhadap Ikhwanul Muslimin. Jurnal mingguan *al-Ta'âwûn*, *al-Syu'au* dan jurnal bulanan *al-Manâr* disita. Pemerintah melarang penerbitan majalah-majalah tersebut, kantor redaksi disegel dan rapat redaktornya di bawah kontrol pemerintah, di samping penahanan Hasan al-Banna dan al-

Sukri. Sikap antagonistik pemerintah terhadap Ikhwanul Muslimin membuat gerakan ini semakin digandrungi simpatisan dan pendukungnya dan pemimpin umumnya pun sangat disegani masyarakat.

Ikhwanul Muslimin mengadakan muktamar VI,³⁷ Hasan al-Banna menghimbau anggota dan simpatisan untuk berperan dalam mensukseskan pemilu 1942. Inilah saat pertama al-Banna melibatkan diri dalam politik praktis. Rencana pencalonan diri dalam Pemilihan Umum atas nama wilayah Ismailiyah yang mendapat dukungan Ikhwan, ternyata tidak mendapat restu Nahas Pasha. Al-Banna tetap bersikeras melalui beberapa pertemuan mengingatkan dan melakukan negosiasi kepada Nahas Pasha. Karena tekanan Inggris, akhirnya al-Banna mengundurkan diri.³⁸

Beberapa aktifitas digelar seperti mengadakan pertemuan rahasia, mengeluarkan pamflet agar pemerintah menghapus penjualan minuman keras, pesta-pesta tari dan aktifitas amoral lainnya. Pemerintah berjanji akan menjalankan sebagian besar tuntutan ini. Jelaslah kepribadian al-Banna sebagai seorang tokoh yang terus berkorban dan berjuang untuk tujuan-tujuan politiknya untuk kebangkitan gerakan

³³ Thameem Ushama, *Hasan al-Banna: Vision and Mission*, (Kuala Lumpur: AS. Noordeen, 1995), h. 49.

³⁴ Thameem Ushama, *Hasan al-Banna: Vision...*, h. 49.

³⁵ Jabir Rizki, *Pemerintah dan Politik dalam Konsep Hasan al-Banna*, terjemahan dari *al-Daulah wa al-Siyâsah fî Fikri Hasan al-Banna*, oleh Imaduddin, dkk., (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 43.

³⁶ Setelah satu bulan al-Banna dibebaskan sejak itu ia mengambil sikap ekstra hati-hati dalam berpolitik dan mengorganisir pasukannya. Al-Banna berusaha menghindari Inggris agar tidak melakukan intervensi lebih jauh, disamping itu mendirikan gerakan bawah tanah (*al-Tanzhim al-Sirri*). Tidak diketahui pasti kapan organisasi ini dibentuk (diperkirakan 1942) terdiri dari para ikhwan yang telah diberi latihan militer. David Sagif, *Fundamentalism and Intellectuals in Egypt*, (1973-1992) (London: Frank Cass, 1997), h. 22.

³⁷ Muktamar ini berlokasi di kantor pusat di al-Hilmiyah al-Hadidiyah tanggal 11 Zul Hijjah 1329 bertepatan dengan 9 Januari 1941 dihadiri jumlah besar ikhwan Mesir dan wilayah sekitar. Sebagaimana pada muktamar sebelumnya al-Banna menyampaikan tema-tema yang sama dan dua tema lain adalah perserikatan asing dan kerajaan. Mahmud Abdul Halim, *Al-Ikhwân al-Muslimûn Ahdâts Sughât al-Târîkh*, (Iskandariyah: Dâr al-Da'wah, 1984), h. 277.

³⁸ Keputusan terjun langsung ke dalam politik praktis merupakan langkah pertama Ikhwanul Muslimin. Selain al-Banna, yang ajukan untuk mencalonkan diri adalah Muhammad Nasir untuk wilayah pemilihan Bin-ha. Dan kantor pusat meminta agar anggota Ikhwan membantu calon-calon lain yang mempunyai kesiapan untuk mendukung fikrah Islam. Di balik semua ini, Ikhwanul Muslimin yakin bahwa parlemen adalah satu-satunya paru-paru untuk menghirup udara kebebasan dalam naungan hukum `Urf (konvensional) saat itu, juga demi menikmati hak yang dijamin konstitusi bagi setiap warga negara dengan cara yang konstitusional. Dari enam orang yang mencalonkan diri, hanya beberapa yang disetujui termasuk Muhammad Hamid Abunnashr di Manfalut. Hasan al-Banna, *al-Ikhwân wa al-Intikhâbât*, dalam koran *al-Ikhwân al-Muslimûn*, tahun III. No.119 (5 september 1948), h. 7. Lihat juga dalam Muiz Ruslan, *al-Tarbiyah al-*

dan terlaksananya reformasi umum.³⁹ Temuan-temuan ini tidak berlangsung lama pada masa pemerintahan Partai *al-Wafd*.

Segera pemerintah melakukan tekanan-tekanan terhadap Ikhwanul Muslimin dan menghancurkan cabang-cabangnya di beberapa pelosok Mesir. Tidak lain karena intervensi dan usulan pihak kolonial Inggris serta sikap loyal para penguasa. Al-Banna kemudian mengingatkan para Ikhwan dan menyampaikan kepada mereka perihal langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi kesulitan dan tantangan baik dari penjara dan tempat pengasingan. Pada bulan Oktober 1941 Partai *al-Wafd* dipaksa untuk melepaskan jabatan dan mundur dari pemerintahan.⁴⁰

Departemen baru telah dibentuk oleh Partai *al-Sya'diyûn* dibawah pimpinan Ali Maher. Partai ini siap mensukseskan pemilu dan Ikhwanul Muslimin diberi kesempatan mengajukan kandidat mereka. Atas dukungan para Ikhwan, al-Banna mengajukan pencalonan dirinya mewakili wilayah Isma'iliyah. Tapi inisiatif kedua kali pencalonan inipun diketahui pemerintah Inggris, seraya mengirim surat kepada Ali Maher untuk segera memblokade. Ali Maher kemudian menuntut al-Banna dan melakukan beberapa cara agar pencalonannya gagal. Usaha Ali Maher tidak berhasil dan tidak mendapat respon. Tapi sikap menolak terhadap permohonan pemerintah dijadikan alasan untuk mengikis habis Ikhwan dan melarang aktifitasnya. Ikhwanul Muslimin kalah dalam pemilu dan suara di dominasi partai lawan yang memang mempengaruhi opini publik dengan cara kurang sehat. Sehingga situasi saat itu lebih banyak menguntungkan para nasionalis dan sekularis. Beberapa Ikhwan telah dikalahkan di beberapa wilayah pemilihan. Hasil pemilu bukanlah merupakan dasar sikap oposisi Ikhwan terhadap deklarasi Maher (deklarasi perang melawan Jerman), tapi kelanjutan sikap tegas mereka sejak permulaan perang yang didukung oleh mayoritas kekuatan politik nasional. Ali Maher kemudian dibunuh oleh para pemuda dari

Partai *Hizb al-Wathan*, bernama Muhammad al-Isawi.⁴¹

Walaupun Ali Maher dibunuh para pemuda Partai *al-Hizb al-Wathan*, namun tuduhan tetap diarahkan kepada para Ikhwan. Hasan al-Banna, Ahmad Sukri, Zainal Abidin dan tokoh Ikhwan lain ditangkap. Mereka dibebaskan setelah diketahui benar pelaku pembunuhan atas Ali Maher. Al-Banna melakukan negosiasi terhadap pemerintah, menghilangkan persepsi negatif mereka terhadap Ikhwanul Muslimin selama ini dan menyampaikan pesan Ikhwan (tuduhan tanpa bukti).⁴² Al-Nuqrashi tidak menghiraukan tuntutan Ikhwanul Muslimin, tetap melakukan tekanan dan tidak membiarkan organisasi ini eksis di bumi Mesir.

2. Pasca Perang Dunia II (1945-1948 M)

Menjelang berakhir perang dunia ke II, raja membubarkan Partai *al-Wafd* tepatnya pada tahun 1944 akhir dan sejak itu sampai 1951, memerintah Mesir melalui serangkaian pemerintahan minoritas yang tidak representatif dalam suasana tumbuhnya kekerasan dan konflik. Posisi Ikhwanul Muslimin jadi mendua; Menentang kebijaksanaan raja yang menyangkut kepentingan nasional, religius dan sosial, juga menentang Partai *al-Wafd* terutama karena keberpihakannya kepada aliran kiri dan komunis yang muncul dan menjadi kokoh pada akhir peperangan, akibat makin meluasnya rasa ketidakpuasan ekonomi dan disamping meningkatnya kewibawaan dan pengaruh Uni Soviet. Al-Banna sendiri tampaknya berharap raja bersedia mengadakan persetujuan dengannya dan memberikan kepada tokoh Ikhwan posisi penting dalam negara, sementara sebagian penasehat raja masih berfikir untuk memfungsikan gerakan ini sebagai media untuk melawan Partai *al-Wafd*, namun tak satupun pihak yang bersedia membuat suatu konsesi politik, bagaimana pun

⁴¹ Tepatnya pada tanggal 24 Februari 1945 ketika meninggalkan gedung Parlemen. David Sagiv, *Fundamentalism and Intellectuals in Egypt*, (London, Frank Cass, 1995), h. 33.

⁴² Dua senior Ikhwanul Muslimin juga berusaha mengkonfirmasi masalah ini. Muhammad al-Isawi memang anggota Ikhwan, tapi ia melakukan pembunuhan karena sebuah pergerakan (pengaruh pergerakan). David Sagiv, *Fundamentalism and Intellectuals in Egypt*, (London, Frank Cass, 1995), h. 33.

³⁹ Dunne Jeha, *Religious and Political Trends in Modern Egypt* (Washington, 1950), h. 37-41.

⁴⁰ *Ukhwan al-Muslimin: Vision and Reality*, h. 51.

publik yang mengikuti Ikhwanul Muslimin belum siap berkompromi.⁴³

Pada bulan Desember 1945, Ikhwanul Muslimin mengadakan kongres besar mirip muktamar ke V, tidak lain dalam rangka meyakinkan pendirian anggota akan posisi dan tujuan dasar gerakan. Dalam kongres ini ditetapkan beberapa langkah penting yaitu: disempurnakannya mekanisme tugas (antara ketua umum, internal kantor pusat dan badan pelaksana), ditetapkannya beberapa amandemen untuk diusulkan kepada pihak pemerintah, departemen pelayanan sosial (salah satu departemen dalam keorganisasian Ikhwanul Muslimin) terdaftar di Kementerian Urusan Sosial dan mendapat subsidi untuk pelaksanaannya. Tidak ada lagi rasa khawatir dan cemas dalam pengembangan organisasi ini pada tahap selanjutnya.⁴⁴ Lebih dari itu upaya untuk menciptakan kemerdekaan Mesir mengalami kemudahan. Pada masa kepemimpinan al-Nuqrashi, Ikhwan mencoba membangkitkan semangat publik, mengadakan beberapa aktifitas seperti ceramah, publikasi, surat-menyurat (murâsalah), dan tak lupa beberapa pertemuan di desa-desa dan kota-kota di Mesir.

Pada periode ini beberapa pertemuan dan rapat umum Ikhwanul Muslimin menghasilkan momentum menjelang tahun akademi Universitas. Karenanya menggiring Ikhwanul Muslimin dapat berperan aktif dalam kancah pergerakan nasional dan mempersiapkan anggotanya sebagai pemimpin masa depan. Di Universitas Fu'ad terbentuk beberapa organisasi pemuda yaitu pendukung partai *Hizb al-Waṭan* dan *Mishr al-Fatât*. Disamping itu bermunculan beberapa partai kecil yang saling silang pendapat dengan partai lainnya.⁴⁵ Kesemuanya memiliki interes politik terhadap pemerintah.

Pemerintah Mesir mengeluarkan sebuah memorandum menuntut Inggris agar segera mempersiapkan pertemuan antar kedua negara

meninjau kembali hasil perjanjian 1936. Tapi Inggris tetap beranggapan bahwa perjanjian yang pernah dilaksanakan sangat menguntungkan pihak Mesir (kesejahteraan masyarakat terjamin). Mendengar hal ini, para mahasiswa tidak dapat mentolerir sikap Inggris, spontan mengadakan demonstrasi sebagai ekspresi sikap sentimen dan ketidakpuasan terhadap kolonial Inggris dan sikap loyal pemerintah. Terjadilah serangan besar-besaran terhadap istana Abidin pada tanggal 9-10 Februari 1946. Kabinet al-Nuqrashi mengundurkan diri dan berkuasa sesudahnya Ismail Shidqi pada tanggal 15 Februari 1946.⁴⁶ Kemudian muncul beberapa lembaga yang dimobilisir oleh partai-partai yang ada sebagai langkah antisipatif terhadap situasi ini. Kelompok *al-Wafd* dan komunis menyangkan ketidakterlibatan Ikhwanul Muslimin dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Beberapa delegasi menuntut al-Banna untuk bekerjasama. Ia tetap berpendirian bahwa organisasinya adalah organisasi gerakan dakwah dan tidak akan ikut andil dalam rencana demonstrasi. Juru bicara Ikhwanul Muslimin menegaskan bahwa para musuh kehilangan cara kecuali mengambil sikap menuduh al-Banna sebagai pemicu demonstrasi dan selalu bersitegang dengan Ismail al-Shidqi. Al-Ikhwan berpikir bahwa keterlibatannya dalam demonstrasi akan mengeliminir sikap misunderstanding musuh terhadap mereka.

Al-Banna mengusulkan kepada pihak pemerintah untuk membentuk persatuan perhimpunan pada tanggal 4 Maret 1946 untuk menetralsir rencana demonstrasi yaitu *Yaum al-Hidâd al-Waṭanî*. Ikhwânul Muslimin tidak peduli dengan al-Wafd yang bersikap menentang bahkan terus melanjutkan kampanye nasional didukung oleh minoritas partai. Al-Banna lalu membentuk Badan Pelaksana Tinggi (Higher Executive Committee). Hari-hari demonstrasi berjalan dengan tenang tanpa ada sikap kasar.⁴⁷ Kegiatan ritual keagamaan di tempat-tempat ibadah juga dilaksanakan sebagai bentuk lain partisipasi politik gerakan ini.⁴⁸

⁴³ Edward Mortimer, *Islam dan Kekuasaan*, terj. oleh M. Nahdi dari, "The Police of Islam", (Bandung: Mizan, 1984), h. 239.

⁴⁴ Bayûmî, *al-Ikhwân al-Muslimûn wa al-Jamâ'ât al-Islâmiyah*, h. 101.

⁴⁵ Bayûmî, *al-Ikhwân al-Muslimûn wa al-Jamâ'ât al-Islâmiyah*, h. 102.

⁴⁶ Ushama, *Hasan al-Banna: Vision...*, h. 54.

⁴⁷ Ushama, *Hasan al-Banna: Vision...*, h. 55

⁴⁸ Berbagai sarana partisipasi politik yang dikembangkan untuk meredakan emosi para Ikhwan dan menyuju persatuan

Ikhwanul Muslimin mendapat beberapa kemudahan pada masa kepemimpinan Shidqi antara lain keluarnya aturan yang membolehkan penerbitan jurnal (Mei 1946), konsesi pembelian peralatan cetak dengan harga cukup murah, bebas mengatur al-Jawalah dan propaganda paramiliter, bebas memiliki tanah di kawasan penting dan perkampungan. Respon positif pemerintah terbukti dengan dilantikannya Muhammad Hasan al-Usmawi sebagai menteri pendidikan. Departemen Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial memberi hak-hak khusus kepada gerakan ini.

Ketika Ismail Shidqi melakukan perundingan dengan Inggris, al-Banna menyambut baik rencana itu dan menasehatinya agar bersikap serius, terfokus pada dua persoalan yaitu kemerdekaan Mesir dan peninjauan kembali perjanjian 1936. Ikhwanul Muslimin menghimbau Shidqi untuk tidak memperlambat proses perundingan, menyampaikan kepada Inggris akan kebutuhan rakyat Mesir kepada kemerdekaan penuh atau perlu berjuang dan menghadapi segala konsekwensinya.⁴⁹ Pengikut gerakan ini benar-benar menyadari implikasi dari tuntutan dan sugesti mereka dan mengkanter serangan.

Usulan Ikhwanul Muslimin juga disampaikan dalam bentuk publikasi beberapa artikel ditujukan kepada Raja Faruq dan partai politik lain untuk melakukan upaya-upaya dan memperbaharui program kerja berorientasi ke masa depan. Ikhwan juga bekerjasama dengan partai politik

dan perhimpunan lain mengingatkan Shidqi, sejauhmana asumsi dan komitmennya terhadap perundingan. Bersamaan dengan hal itu, tersebar beberapa artikel dalam jurnal, menyerang segala bentuk dan proses perundingan dan mengklaim pemerintah Inggris telah melanggar kesepakatan. Beberapa seminar digelar untuk melakukan studi dan analisa terhadap posisi kedua belah pihak (Ismail Shidqi dan pihak Inggris) dan bahan-bahan materi perundingan.

Ikhwanul Muslimin tidak puas dengan hasil perundingan yang cenderung menguntungkan pihak kolonial dan merugikan pihak jajahan. Al-Banna—*al-Mursyid al-'Am*—kemudian mengeluarkan statemen yang menyebutkan beberapa kerugian bila perundingan dilanjutkan dan menyarankan pihak pemerintah Mesir untuk memikirkan beberapa solusi, karena hak-hak masyarakat telah dirampas dan sulit dikembalikan. Statemen tersebut ternyata dapat memobilisir dan mengarahkan opini publik dan organisasi politik lain terhadap pemerintah. Hal ini juga disponsori para Ikhwan.⁵⁰ Pemerintah terus melakukan tekanan dan membatasi ruang gerak gerakan ini.

Al-Banna tetap berusaha mengingatkan pemerintah atas sikap negatif, antagonistik, dan terlalu agresif terhadap masyarakat muslim khususnya Ikhwanul Muslimin yang sungguh-sungguh berjuang demi kepentingan agama Islam. Ia juga tidak lupa mengingatkan partai al-Wafd yang selama ini melemparkan tuduhan terhadap Ikhwanul Muslimin dan mengklaim sikap menduanya (*ambiguitas*). Selama ini telah dilakukan beberapa pertemuan antara kedua belah pihak yang bertikai, tapi belum membuahkan hasil.

Ikhwanul Muslimin kemudian menuntut raja Faruq dan Shidqi untuk mengumumkan jihad melawan kolonial Inggris dan memutuskan hubungan ekonomi, budaya dan sosial dengannya. Ismail Shidqi dianggap belum mewakili masyarakat Mesir karena tidak menghargai pendapat mereka. Sikap politik gerakan ini mendapat simpati masyarakat dan memotivasi mereka untuk

dan solidaritas Islam adalah membaca qunut bersama. Pada tahun 1936, setiap cabang Ikhwan diinstruksikan untuk mengkoordinir pembacaan qunut bersama. Juga pada tanggal 10 oktober 1946, al-Banna memimpin pembacaan qunut bersama untuk kehancuran kaum imperialis. Bentuk sarana lain yang dilakukan adalah membaca do'a bersama di masjid, seperti yang telah terjadi pada tanggal 3 Agustus 1947. Do'a tersebut ditujukan untuk kebaikan Mesir (saat masalah Mesir dikemukakan di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 5 Agustus 1947). Para perempuan dan ibu rumah tangga juga diinstruksikan untuk membaca do'a bersama di kediaman mereka masing-masing. Disamping itu, perayaan hari-hari besar sejarah Islam juga diperingati sebagai sarana pendidikan politik, seperti peringatan Perang Badr, peristiwa hijrah, maulud Nabi dan lain sebagainya. Para pemimpin menyampaikan penjelasan politik dengan metode yang sangat menggugah perasaan dan emosi anggota dan simpatisan Ikhwan. Muiz Ruslan, *al-Tarbiyah al-Siyasiyah*, h.392

⁴⁹ Bayûmî, *al-Ikhwân al-Muslimûn wa al-Jamâ'ât al-*

⁵⁰ *Ukhuwwah al-Banna al-Banna Vision and* h. 75

melakukan reformasi di Mesir. Sepulangnya (Ismail Shidqi) dari perundingan di London ia mendapat oposisi dari beberapa pihak diantaranya tujuh anggota partai politik al-Wafd.⁵¹ Sebulan setelah kepulangannya terjadilah pemberontakan besar di Mesir. Pemerintah kemudian meliburkan Universitas untuk sementara waktu dan menangkap beberapa anggota partai al-Wafd, komunis dan Ikhwanul Muslimin. Al-Banna saat itu sedang berada di Hijaz untuk menunaikan ibadah haji. Sedangkan Ismail Shidqi mengundurkan diri pada 4 Desember 1946.

Ikhwanul Muslimin tetap berpegang pada pendirian dan tujuan dasar organisasi serta tidak akan bersikap keras terhadap pemerintah sebagaimana yang telah dilakukan partai-partai lain, sepanjang pemerintah bersikap konsekwen dalam menjalankan pemerintahan. Ikhwan juga menuntut kabinet baru untuk mencari jalan meraih simpati masyarakat, mengakhiri negosiasi dan menyeru kepada jihad melawan kolonial Inggris. Artikel-artikel dalam beberapa jurnal menuduh pemerintah dan partai politik serta perhimpunan lain hanya mementingkan kekuasaan dan enggan memikirkan kesejahteraan masyarakat. Al-Banna—*al-Mursyid al-'Am*--menegaskan bahwa persoalan yang paling aktual adalah persoalan masyarakat, bukan negosiasi, perundingan, membentuk departemen dan sibuk dengan urusan pemilu. Maka menurutnya pihak pemerintah harus menetapkan konstitusi kaitannya dengan persoalan umat berdasarkan Alquran dan Sunah.⁵² Aspirasi masyarakat harus relevan dengan Alquran sebagai satu-satunya sumber konstitusi Mesir juga negara muslim lainnya.

Untuk membahas tentang kedudukan kolonial Inggris di bumi Mesir, al-Banna mengutus Musthafa Mu'min pada tanggal 26 Juli 1947 mendampingi Nuqrasi ke PBB. Musthafa menuntut PBB agar bersikap tegas terhadap Inggris. Kemudian pada tahun 1948, Ikhwanul Muslimin terlibat perang melawan Inggris dan telah membunuh banyak pasukan diantaranya beberapa warga

Mesir. Akibatnya, beberapa anggota Ikhwan juga dieksekusi.⁵³ Ini merupakan partisipasi politik Ikhwanul Muslimin yang paling menonjol, sebagai aplikasi konsep politik tentang *jihād fi sabīlillāh* dan kemerdekaan.⁵⁴

Pada akhir tahun 1948 organisasi gerakan ini menjadi kokoh dan mengakar kuat bagaikan sebuah pemerintahan dalam pemerintahan. Nuqrashi Pasha yang diandalkan memimpin negara Mesir 20 hari kemudian terbunuh. Hasan al-Banna juga meninggal beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Februari 1949 oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.. Sejak itu beberapa kekerasan pun terjadi di bumi Mesir melawan kekuatan Inggris.⁵⁵ Partisipasi politik gerakan ini kemudian menyulut bentuk-bentuk pasrtisipasi lainnya, seperti aksi mobilisasi senjata, aksi yang menyerukan untuk menjadi relawan, operasi pelatihan relawan dan sebagainya. Kesemuanya sangat berpengaruh terhadap realitas politik di Palestina dan juga berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan politik di Mesir. Pertempuran-pertempuran Suez memaksa Inggris keluar dari Mesir dan menuju kemerdekaan negara ini.

Penutup

Demikianlah situasi politik di negara Mesir menjelang masa kebangkitannya. Suatu peristiwa yang sempat menggoreskan luka-luka yang tetap membekas hingga saat ini, tidak hanya melanda masyarakat kota, tetapi masyarakat

⁵³ Sagiv, *Fundamentalism and Intellectuals*, h. 237.

⁵⁴ Ikhwanul Muslimin melibatkan diri dalam Perang Palestina sebelum dan sesudah masuknya tentara-tentara Arab di Palestina pada tahun 1948 ini dengan jumlah lebih dari 300 pasukan yang siap tempur. Bahkan al-Banna sebelum tragedi pembunuhannya oleh pihak tertentu, ia sempat menawarkan 10.000 pasukan sukarelawan kepada pemerintah Mesir dan pemimpin Arab lain. Lihat Muiz Ruslan, *al-Tarbiyah al-siyasiyah*, h. 391

⁵⁵ Pasca pembekuan perjanjian 1936, pada tahun 1951 Ikhwanul Muslimin mengobarkan perang gerilya melawan kekuatan Inggris di zona terusan Suez, menggunakan dua bendera: Pertama, bendera Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan keagamaan, kedua bendera mahasiswa sebagai simpatisan Ikhwanul Muslimin yang tergabung dalam front universitas pimpinan Hasan Dauh yang ketika itu adalah ketua mahasiswa Ikhwan. Pada bulan Nopember tahun 1948, gerakan pembentukan katibah telah sampai gaungnya ke kampus-kampus universitas. Muiz Ruslan, *al-Tarbiyah al-siyasiyah*, h. 391

⁵¹ Bayûmî, *al-Ikhwân al-Muslimîn*, h. 110.

⁵² *Ushûba Hasan al-Banna: Vision*, h. 50

yang posisinya marginal sekali pun. Terdapat beberapa faktor--baik positif maupun negatif--yang memberi pengaruh terhadap perkembangan situasi politik di Mesir, yaitu: lahirnya sejumlah pemimpin politik, gerakan pers yang kuat dan bebas, terbentuknya berbagai organisasi dan partai politik dengan orientasinya masing-masing, dan berbagai peristiwa dan jihad politik.⁵⁶

Hasan al-Banna dan gerakannya, Ikhwanul Muslimin merupakan front yang menyikapi situasi tersebut, dari awal kebesaran tokoh utamanya, pembentukan, perkembangan, dan persentuhannya dengan kebijakan politik pemerintah Mesir ketika itu. Walaupun politik bukan tujuan utama, namun peran dan kontribusi gerakan keagamaan tersebut cukup signifikan di Mesir dan juga terhadap sebagian dunia Islam. Sebelum terdepaknya kekuatan Ikhwanul Muslimin belakangan ini, gerakan tersebut sempat mendominasi suara di parlemen yang berakhir dengan terpilihnya seorang presiden versi Ikhwanul Muslimin.

Pustaka Acuan

- Ahsan, Abdullah al-, *Ummah or Nation: Identity Crisis in Contemporary Moslem Society* Markfield: United Kingdom of Islamic Foundation, Markfield Dakwah Centre, 1992.
- Aziz, Jum'ah Amin Abdul, *Zhurûf al-Nasy'ah wa Syakhshiah al-Imâm al-Mu'assis*, Kairo; Dâr al-Tauzi` wa al-Nasy al-Islâmiyah, 2002.
- Banna, Hasan al-, *al-Ikhwan wa al-Intikhabat*, dalam koran *al-Ikhwân al-Muslimûn*, tahun III. No.119, 5 September 1948.
- Banna, Hasan al-, *Da`watonâ fî Thaur Jadîd*, dalam *Majmû`ah Rasâil li al-Imâm al-Syahîd Hasan al-Banna*, Kairo: Al-Mu'assasah al-Islâmiyah li al-Thibâ`ah wa al-Shahâfah wa al-Nasyr, t.th.
- Banna, Hasan al-, *Mudzâkarât al-Da`wah wa al-Dâ`iyah li al-Imâm al-Syahîd Hasan al-Banna*, Kairo: Dâr al-Tauzi` wa al-Nasyr al-Islâmiyah, 1966.
- Banna, Hasan al-, *Risâlah al-Mu`tamar al-Sâdis*, Manshurah, Mesir: Dâr al-Wafâ', t.th.

- Bayumi, Zakaria Sulaiman Al-Ikhwân al-Muslimûn wa al-Jamâ`ât al-Islâmiyah fî al-Hayât al-Siyâsah al-Misriyah (1928-1948), (Kairo: Maktabah Wahbah, 1979).
- Esposito, Jhon L, *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas, terjemahan dari The Islamic Threat: Myth or Reality*, Bandung: Mizan, 1994.
- Esposito, John. L, (Editor), *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial Politik*, terjemahan dari *Islam and Development; Religion and Socio Political Change*, oleh A. Rahman dan Zainuddin, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Halim, Mahmud Abdul, *Al-Ikhwân al-Muslimûn Ahdâts Shughât al-Târîkh*, Iskandariyah: Dâr al-Da`wah, 1984.
- Harahap, Syahrin, *Al-Qur'an dan Sekularisasi: Kajian Kritis terhadap Pemikiran Thaha Husein*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1974.
- Hisket, Mervin, *The Course of Islam in Africa*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1994.
- Hourani, Albert, *Thought in the Liberal Age, 1798-1939*, Oxford: Oxford University Press, 1962.
- Jeeha, Duna, *Religious and Political Trend in Modern Egypt*, Washington: 1950.
- Lapidus, Ira. M, *a History of Islamic Society*, New York: Cambridge University Press, 1998.
- Mitchell, Richard P, *The Society Of The Muslim Brothers*, London: Oxford University Perss, 1968.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Ideologisasi Gerakan Dakwah: Episode Kehidupan M. Natsir dan Azhar Basyir*, Jogjakarta: Sypress, 1996.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Qardawi, Yusuf, *Al-Shahwah al-Islâmiyah baina al-Ikhtilâf al-Masyrû` wa al-Tafarruq al-Madmûm*, Kairo: Dâr al-Shahwah li al-Nasyr wa al-Tauzi`, 1990.
- Qardawi, Yusuf, *Sistem Kaderisasi Ikhwanul Muslimin*, terjemahan dari *al-Tarbiyah al-Islâmiyyah wa Madrasah Hasan al-Banna*, oleh Ghazali Mukri, Solo: Pustaka Mantiq, 1992.
- Rahmena, Ali (Ed.), *Para Perintis Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 1997.

⁵⁶ Muin Dzulqarnain, *al-Tarbiyah al-Siyâsiyah*, h. 77-78.

Rizqi, Jabir, *Pemerintah dan Politik dalam Konsep Hasan al-Banna*, terjemahan dari *al-Daulah wa al-Siyâsah fî Fikri Hasan al-Banna* oleh Imamuddin, dkk., Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Ruslan, Utsman Abdul Muiz, *al-Tarbiyah al-Siyâsiyah `inda al-Ikhwân al-Muslimîn; fî al-Fatrah min 1928 ilâ 1954 fî Mishr*, (Kairo: Dâr al-Tauzî` wa al-Naşr al-Islâmiyah, 1989.

Sagif, David, *Fundamentalism and Intellectuals in Egypt (1973-1993)*, London: Frank Case, 1995.

Ushama, Tameem, *Hasan al-Banna, Vision and Mission*, Kuala Lumpur: Syarikat R&S, 1995.

Wa'i, Taufiq Yusuf al-, *Pemikiran Politik Kontemporer al-Ikhwan al-Muslimun; Studi Analitis, Observatif, Dokumentatif*, terjemahan dari *Al-Fikr al-Siyâsi al-Mu`âshir `inda Ikhwân al-Muslimîn; Dirâsat Tahlîliyat Maidaniyât Muwâtsaqât*, oleh Wahid Ahmadi, dkk., Solo: Era Intermedia, 2003.

